
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19

Zainatun Fajria*)

Budi Wahono)**

Eka Farida*)**

Universitas Islam Malang

Email : riafajria811@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of fiscal decentralization, fiscal stress on economic growth with financial performance as an intervening variable. The data analysis method used in this research is quantitative data analysis using path analysis. The data used is secondary data. The secondary data in this study are financial reports in the province of Bali during the COVID-19 pandemic.

The results of this study indicate that the variable of fiscal decentralization has no significant negative effect on financial performance. Fiscal stress variable has no significant positive effect on financial performance. Fiscal decentralization variable has no significant positive effect on economic growth. Fiscal stress variable has a positive and significant effect on economic growth. The financial performance variable has a positive and significant effect on economic growth. The variable of Fiscal Decentralization on Economic Growth has no effect so that Financial Performance cannot mediate Fiscal Decentralization on Economic Growth. Meanwhile, Fiscal Stress on Economic Growth has no effect so that Financial Performance cannot mediate Fiscal Stress on Economic Growth in Cities/Regencies in Bali Province in 2014-2020.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Fiscal Stress, Financial Performance, Economic Growth.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Anggeraini, 2012).

Masalah pertumbuhan ekonomi sudah menarik minat para ahli ekonomi sejak masa Adam Smith sampai dengan banyak para ahli ekonomi dewasa ini yang pada waktu-waktu yang lalu perhatian para ahli-ahli ekonomi itu terutama hanya tertuju pada masalah pertumbuhan ekonomi negaranegara maju, dewasa ini perhatian sebagian dari mereka telah pula diarahkan pada masalah pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk

diantaranya Indonesia, dalam konteks ini lebih spesifik lagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada masih tertahannya kinerja ekonomi Bali. Pada triwulan IV 2020, ekonomi Bali masih berkontraksi meskipun sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Bali tercatat kontraksi 12,21%, lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,32% (bi.go.id). Kontraksinya ekonomi Bali disebabkan oleh masih berlangsungnya penyebaran COVID-19 yang menyebabkan sejumlah negara masih melakukan kebijakan travel restriction dan lockdown. Hal ini kemudian berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sehingga menekan kinerja pariwisata. Perbaikan ekonomi Bali secara terbatas terutama didorong oleh adanya libur natal dan tahun baru yang mendorong kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Bali. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Bali bersumber kinerja dari konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi bersumber dari kinerja LU utama Bali yaitu LU penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin), LU perdagangan, serta LU pertanian. Secara keseluruhan tahun 2020, ekonomi Bali tumbuh kontraksi, 9,31% (bi.go.id), lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh positif. Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 membuat berbagai negara menerapkan kebijakan travel restriction sehingga kunjungan wisatawan menurun signifikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota provinsi Bali setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 1.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Badung	6,05	6,19	5,96	5,28	6,73	5,81	-16,5
Kab. Bangli	6,53	6,19	6,14	5,37	5,48	5,46	-4,10
Kab. Buleleng	6,98	6,24	6,81	6,08	5,60	5,53	-5,76
Kab. Gianyar	6,80	6,30	6,31	5,46	6,01	5,61	-8,38
Kab. Jembrana	5,98	6,11	6,28	5,32	5,59	5,56	-4,96
Kab. Karangasem	5,83	6,16	6,24	5,31	5,44	5,50	-4,45
Kab. Klungkung	6,01	6,00	5,92	5,06	5,48	5,42	-6,35
Kab. Tabanan	6,96	6,07	6,02	5,38	5,71	5,59	-6,14
Kota Denpasar	7,00	6,14	6,51	6,05	6,42	5,82	-9,42
Provinsi Bali	6,73	6,03	6,33	5,56	6,31	5,60	-9,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Masalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan pada fenomena yang dialami Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali di atas, dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Berbicara tentang makro ekonomi, maka tidak terlepas dari peran serta Pemerintahan suatu Negara sebagai pengatur Kebijaksanaan dan pembuat Undang – Undang. Menyikapi fenomena di atas, pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang No. 22 dan

Undang – Undang No. 25 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya pada tahun 2004, Pemerintah kembali menerbitkan UU No, 32 dan 34 Tahun 2004 sebagai pengganti kedua Undang – Undang tersebut. Hakekat kedua Undang – Undang tersebut itu sendiri adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih 2003), dan desentralisasi fiskal merupakan implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar, sehingga perlu diatur dan diupayakan perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 dan 34 mengenai adanya kewenangan daerah dan sebagai implikasinya adalah adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih efisien. Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya masing-masing mendapat kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerahnya. Namun di sisi lain, akibat kebijakan ini dimungkinkan dapat menjurus pada disparitas (ketimpangan) yang tinggi di setiap daerah.

Adanya desentralisasi tentu akan mendorong terjadinya disparitas fiskal mengingat setiap daerah memiliki kesiapan yang berbeda-beda baik dari segi potensi sumber daya maupun kemampuan manajerial keuangan daerahnya. Nanga (2005) menunjukkan adanya disparitas fiskal yang tinggi antar daerah yang memasuki era otonomi. Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, seperti pajak, retribusi daerah, dan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

Studi tentang *Fiscal Stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting, terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya berikut penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Dinapoli (2016), *fiscal stress* adalah penilaian tentang kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan situasi yang unik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (anggaran solvabilitas). Pengertian-pengertian tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian beberapa peneliti asing yang membahas tentang *fiscal stress*, seperti Grand Cayman (terletak di Inggris), Afrika Selatan, U.S, dan negara lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Sukarsa (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Sartina (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas Juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini sesuai dengan teori.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian ini “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimana desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana kinerja keuangan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori akuntansi, khususnya akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen dan ilmu pengetahuan teoritis terkait dengan desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi keuangan daerah, khususnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

b. Bagi Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Bali

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam menyikapi fenomena yang berkembang sehubungan dengan desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi dalam mengembangkan dan memperluas penelitian berikutnya.

Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka Teoritis

(Sartina, 2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Aceh”. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 13 kabupaten. Metode penelitian yang digunakan analisis path. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Propinsi Aceh. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota se- Propinsi Aceh, sedangkan *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Aceh. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Nanggroe Aceh. Kinerja keuangan daerah berpengaruh didalam menstimulus pengaruh negatif desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se- Kabupaten/Kota se- Provinsi Aceh.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Fiscal Stress

Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai ketidakmampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shamsub dan Akoto (2004) menyimpulkan bahwa :

Our findings suggest some policy implications. State and local governments with high stress should consider limiting the growth of total expenditure to be in line with revenue growth. Those states should also allow local governments to assume more spending responsibilities, which may lead to a reduction in fiscal stress. In addition, increasing the diversification of local government

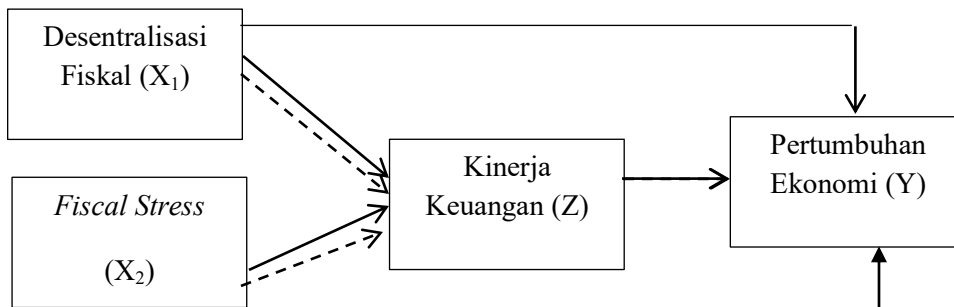
revenue sources is a crucial factor that reduces fiscal stress amid the reduction in state aid to local governments.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Shamsud dan Akoto (2004) dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* dapat diindikasikan jika pengeluaran daerah berupa belanja modal mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*.

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah ada beberapa ukuran kinerja untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio kemandirian, dan rasio keserasian. Rasio efisiensi digunakan dalam penelitian ini karena dilihat fenomena setiap tahunnya pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan efisiensi anggaran di masing-masing kabupaten/kota.

Pengembangan Hipotesis



Keterangan :

→ : pengaruh secara langsung
 ---→ : pengaruh tidak langsung

Gambar 1. Kerangka Konseptual

H1 : Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan

H2 : Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H3 : Kinerja Keuangan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H4 : Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek itu (Sugiono, 2011:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten seluruh Provinsi Bali. Sampel yang digunakan sebanyak 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Berikut ini penulis menentukan beberapa kriteria saat akan mengambil sampel untuk digunakan sebagai bahan penelitian, yaitu:

- 1) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali menyampaikan Laporan Keuangan APBD dari tahun 2014-2020.
- 2) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali mencantumkan data-data mengenai Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2014-2020 pada Laporan Keuangan APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mempelajari atau menggunakan laporan APBD pemerintahan Kota/Kabupaten di Bali

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) yang digunakan adalah PDRB berdasarkan Harga Berlaku. Pertumbuhan ekonomi (PE) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan formula (Sukirno, 2011).

$$PE = \frac{(PDBrt - PDBrt - 1)}{(PDBrt - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PDBrt : Produk Domestik Bruto Regional tahun sekarang

PDBrt-1 : Produk Domestik Bruto Regional tahun sebelumnya

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya atau didaerah. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi

terhadap anggaran sebab pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat. Penggunaan variabel dengan menggunakan formula (Mardiasmo, 2009).

$$DF = \frac{\text{PAD} + \text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Pemkot/kab}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DF : Desentralisasi Fiskal

Fiscal Stress

Sobel dan Holcombe dalam Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. Tekanan fiskal (*fiscal stress*) dapat dirumuskan (Shamsub & Akoto, 2004)

$$\text{Fiscal Stress} = \text{PAD} - \text{Total Belanja}$$

Kinerja Keuangan

Dalam organisasi pemerintah ada beberapa ukuran kinerja untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio kemandirian, dan rasio keserasian. Rasio efisiensi digunakan dalam penelitian ini karena dilihat fenomena setiap tahunnya pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan efisiensi anggaran di masing-masing Kota/Kabupaten. Kinerja keuangan dimaksud dalam penelitian ini diproxy melalui rasio efisiensi yang menurut Hamzah (2006) merupakan salah satu rasio yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ini diukur dengan menggunakan formula (Hamzah, 2006).

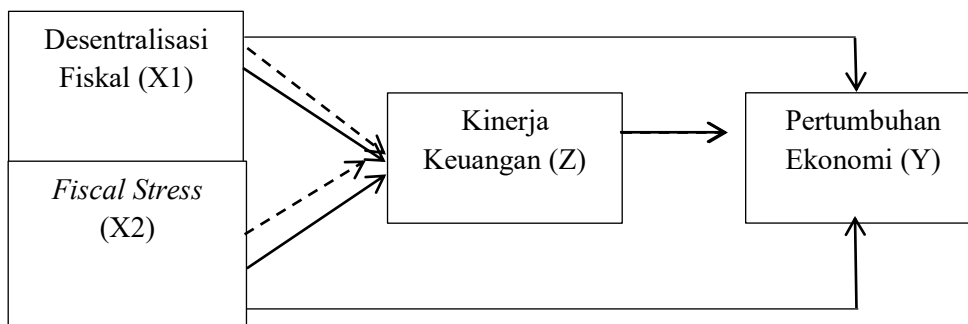
$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan aplikasi perangkat lunak dalam menganalisis data. Aplikasi yang digunakan adalah SPSS 24 *Statistical Product and Service Solution*. Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Analisis Path (Analisis Jalur)

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2015:115) teknik analisis jalur digunakan dalam pengujian kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada tiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1 dan X2 terhadap Z dan Y. Untuk menggambarkan hubungan-hubungan kausalitas antar variabel yang akan diteliti. Peneliti menggunakan model diagram yang biasa disebut paradigma penelitian, ini digunakan agar lebih memudahkan melihat hubungan-hubungan kausalitas tersebut. Dalam analisis jalur model diagram yang digunakan biasanya disebut Diagram Jalur (*Path Diagram*). Setiap variabel disimbolkan dalam bentuk kotak sedangkan variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau error digambarkan dalam bentuk lingkaran. Diagram jalur dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2` Model Analisis Jalur

- 1) Model 1 menjelaskan pengaruh langsung DF (X₁), FS (X₂) terhadap KK(Z)

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$
- 2) Model 2 menjelaskan pengaruh langsung DF (X₁), FS (X₂) terhadap terhadap PE (Y)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$
- 3) Model 3 menjelaskan pengaruh KK terhadap PE

$$Y = \beta_3 Z$$
- 4) Model 4 menjelaskan pengaruh tidak langsung DF (X₁), FS (X₂) terhadap PE (Y) dengan KK(Z)

$$Y = (\beta_1 + \beta_2) \beta_3 Z$$

Pembahasan Dan Simpulan

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Bali. Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, terdapat 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang menjadi sampel penelitian. Daftar nama-nama Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 1 Daftar Sampel Penelitian

NO	Nama Kota/Kabupaten
1	Kab. Badung
2	Kab. Bangli
3	Kab. Buleleng
4	Kab. Gianyar
5	Kab. Jembrana
6	Kab. Karangasem
7	Kab. Klungkung
8	Kab. Tabanan
9	Kota Denpasar

Sumber : data diolah, 2021

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi dengan variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Des. Fiskal	63	-82,56	3693,04	210,3039	681,33932
Fis. Stress	63	-1918091612649	299882031673	-1084879765032,1740	419077585380,34440
Kin. Keuangan	63	-,56	,61	,0924	,20180
Per.Ekonomi	63	-,22	,45	,1105	,12732
Valid N (listwise)	63				

Sumber : Output SPSS, 2021

- Hasil perhitungan desentralisasi fiskal (X1) diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 3693,04 dan nilai terendah (*min*) sebesar -82,56 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 210,3039 dan standar deviasi sebesar 681,33932. Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai desentralisasi fiskal tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 dan Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai desentralisasi fiskal terendah adalah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020
- Hasil perhitungan *fiscal stress* (X2) diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 299.882.031.673 dan nilai terendah (*min*) sebesar -1.918.091.612.649 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar -1.084.879.765.032,1740 dan standar deviasi sebesar 419.077.585380,34440. Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai *fiscal stress* tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Tabanan pada tahun 2015 dan Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai *fiscal stress* terendah adalah Kabupaten Buleleng pada tahun 2016
- Hasil perhitungan kinerja keuangan (Z) diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 0,61 dan nilai terendah (*min*) sebesar -0,56 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0924 dan standar

deviasi sebesar 0,20180. Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai kinerja keuangan tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 dan Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai kinerja keuangan terendah adalah Kabupaten Badung pada tahun 2020.

4. Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 0,45 dan nilai terendah (*min*) sebesar -0,22 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1105 dan standar deviasi sebesar 0,12732. Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2014 dan Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Badung pada tahun 2020.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		63
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10201225
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,998
Asymp. Sig. (2-tailed)		,272

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.6, maka data terdistribusi secara normal, karena dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,272 lebih besar dari nilai α (0,05). Sehingga disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dimana dalam pengujian analisis path dilakukan pada tiap masing-masing persamaan secara individu.

- 1) Analisis model 1 menjelaskan mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal (X1) dan *Fiscal Stress* berpengaruh langsung terhadap Kinerja Keuangan (Z), berikut hasil pengujian model 1 :

Tabel 4. Hasil Regresi Model 1

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,221403108	0,069649338		3,178826	0,002339
	Des. Fiskal	-2,75555E-05	3,72442E-05	-0,093035532	-0,73986	0,462269
	Fis. stress	1,1354E-13	6,05519E-14	0,235787904	1,875094	0,065649

a Dependent Variable: Kin. Keuangan

Sumber : Output SPSS, 2021

Berdasarkan pada tabel 4, model persamaan regresi yang di hasilkan adalah :

$$Z = -0,093X_1 + 0,236X_2$$

Dimana :

Z= Kinerja Keuangan

X₁= Desentralisasi Fiskal

X₂=Fiscal Stress

Model persamaan pada tahap 1 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengaruh variabel Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan sebesar -0,093.
- Pengaruh variabel *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan sebesar 0,236.

- Analisis model 2 menjelaskan mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal (X₁) dan *Fiscal Stress* (X₂) berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), berikut hasil pengujian regresi model 2:

Tabel 5. Hasil Regresi Model 2

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,239398245	0,041875772		5,716868	3,63E-07
	Des. Fiskal	1,2064E-05	2,23926E-05	0,064561759	0,53875	0,592052
	Fis. stress	1,21138E-13	3,6406E-14	0,398746063	3,327428	0,001501

a Dependent Variable: Per.Ekonomi

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan pada tabel 5, model persamaan regresi yang di hasilkan adalah :

$$Y = 0,065X_1 + 0,399X_2$$

Dimana :

Y= Pertumbuhan Ekonomi

X₁= Desentralisasi Fiskal

$X_2 = \text{Fiscal Stress}$

Model persamaan pada tahap 2 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengaruh variabel Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,065
- Pengaruh variabel *Fiscal Stress* terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,399

- Analisis model 3 menjelaskan mengenai pengaruh Kinerja Keuangan (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 6. Hasil Regresi Model 3

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,079923108	0,015163823		5,270644	0,000002
	Kin. Keuangan	0,330968971	0,068769909	0,524602779	4,8127	0,000010

a Dependent Variable: Per.Ekonomi

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari hasil penelitian pada tabel 6 maka dapat di hasilkan rumusan model analisis jalur (*path analysis*) pada model 3 sebagai berikut :

$$Y = 0,525 Z$$

Hasil penelitian pada analisis jalur model 3 dapat dijelaskan bahwa besar pengaruh langsung dari variabel Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,525.

- Analisis model 4 menjelaskan hasil pengaruh Desentralisasi Fiskal (X1) dan *Fiscal Stress* (X2) berpengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Kinerja Keuangan(Z)

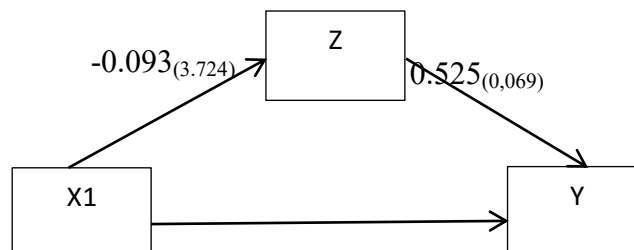
$$Y = (-0,093 \times 0,525) Z + (0,236 \times 0,525) Z$$

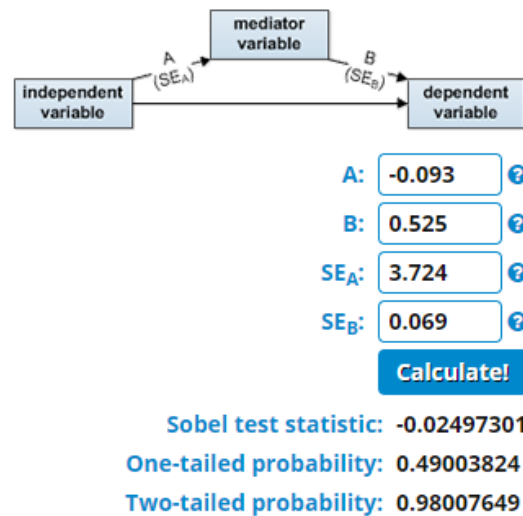
Pengaruh variabel Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kinerja Keuangan jadi pengaruh tidak langsung sebesar -0,048825 dan 0,1239.

Hasil Uji Sobel

Hasil Uji Sobel DF (X₁) – KK (Z) – Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian sobel bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh tidak langsung dengan mediasi variabel intervening pada pengujian pertama adalah pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kinerja Keuangan, berikut pengujiannya:



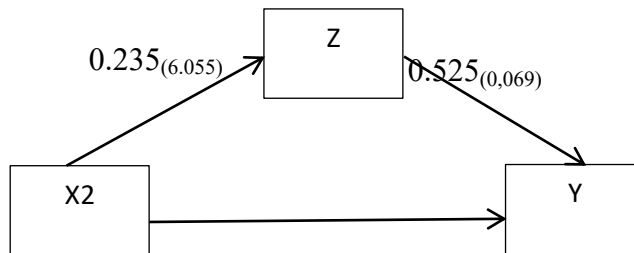


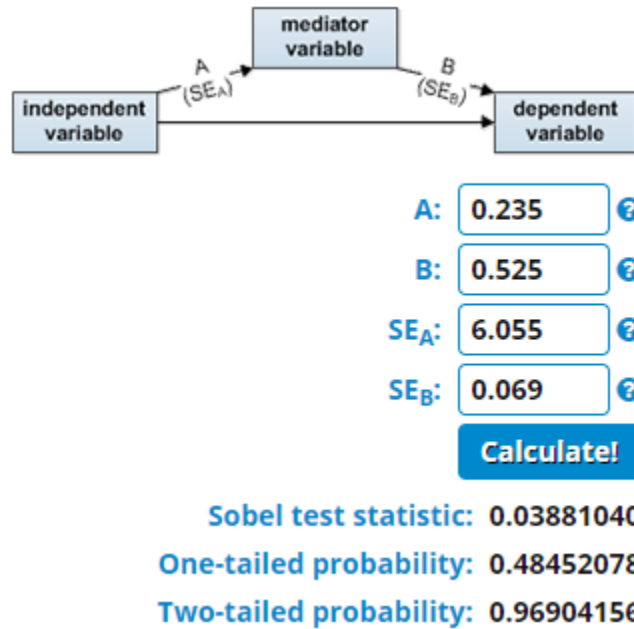
Gambar 3
Hasil Uji Sobel $X_1 - Z - Y$

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa nilai *one-tailed probability* atau variabel Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $0.490 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan (Z) tidak dapat memediasi Desentralisasi Fiskal (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil Uji Sobel FS (X_2) – KK (Z) – Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian sobel bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh tidak langsung dengan mediasi variabel intervening pada pengujian pertama adalah pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kinerja Keuangan, berikut pengujiannya:





Gambar 4
Hasil Uji Sobel $X_1 - Z - Y$

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa nilai *one-tailed probability* atau variabel *Fiscal Stress* pada Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $0.485 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan (Z) tidak dapat memediasi *Fiscal Stress* (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Implikasi Hasil Penelitian

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X_1) dan *Fiscal Stress* (X_2) Terhadap Kinerja Keuangan (Z)

Hasil yang didapat dari penelitian intervening dan di dukung dengan berbagai uji di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai tingkat signifikansi probabilitas sebesar 0,462 sehingga signifikansi probabilitas $>$ signifikansi α yaitu ($0,462 > 0,05$). Variabel *Fiscal Stress* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai tingkat signifikansi probabilitas sebesar 0,066, sehingga signifikansi probabilitas $>$ signifikansi α yaitu ($0,066 > 0,05$).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu daerah dengan desentralisasi fiskal yang tinggi belum tentu menjamin kinerja keuangan daerah. Hasil ini sesuai dengan teori Hasugian (2006), yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang dititikberatkan pada kabupaten/kota, akan memberi keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima. Sedangkan jika suatu daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi maka daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan

terhadap pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan teori Shamsud dan Akoto (2004) yang menyatakan bahwa pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satina (2011) dan Muryawan dan Sukarsa (2016) yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X_1) dan *Fiscal Stress* (X_2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Hasil yang didapat dari penelitian intervening dan di dukung dengan berbagai uji di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,592 sehingga signifikansi probabilitas > signifikansi α yaitu ($0,592 > 0,05$). Variabel *Fiscal Stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai tingkat signifikansi probabilitas sebesar 0,002, sehingga signifikansi probabilitas < signifikansi α yaitu ($0,002 < 0,05$).

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Namun, hal ini dapat terwujud jika sistem yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang diberikan. Jika terjadi kesalahan seperti tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, maka tentu tidak akan tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak daerah, selain itu penurunan rasio dapat disebabkan oleh pandemi covid-19. Sejak pandemi covid-19, masyarakat sulit untuk bekerja seperti biasanya karena dibatasi melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka masyarakat yang terkena covid-19, sehingga pembatasan ini mengurangi pemasukan masyarakat dan akhirnya kesulitan untuk membayar pajak. Selain itu, sudah sering terjadi beberapa pejabat pemerintah daerah bahkan pusat pun masih ada yang menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sehingga dengan desentralisasi fiskal ini pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

Sedangkan *Fiscal stress* sebagai ketidakmampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya (Arnett, 2011). Hal ini sesuai dengan teori Shamsud dan Akoto (2004) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* dapat diindikasikan jika pengeluaran daerah berupa belanja modal mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi *fiscal stress*, pemerintah daerah harus mengurangi laju pertumbuhan pengeluaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Dimana *fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting

keberhasilan dalam era otonomi. Hasil penelitian lain yang diungkapkan oleh Purnaninthesa (2006) dalam Muryawan dan Sukarsa (2016) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tekanan fiskal yang tinggi, daerah cenderung untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai sarana pembiayaan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatannya sendiri (PAD), yang pada akhirnya akan bermuara pada bertumbuhnya perekonomian suatu daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satina (2011) dan Muryawan dan Sukarsa (2016) yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satina (2011) dan Muryawan dan Sukarsa (2016) yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kinerja Keuangan (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Hasil yang didapat dari penelitian intervening dan didukung dengan berbagai uji di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai tingkat signifikansi probabilitas sebesar 0,000, sehingga signifikansi probabilitas < signifikansi α yaitu ($0,000 < 0,05$).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan memiliki peran penting dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola dana yang cukup besar. Kewenangan tersebut harus dibarengi dengan kinerja keuangan atau pengelolaan anggaran yang baik sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya dan cenderung tidak akan mengalami pemborosan anggaran.

Peningkatan efisiensi anggaran selalu diusahakan untuk dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya. Efisiensi tersebut dengan mengeluarkan banyak kebijakan maupun program dengan prinsip pemerintahan *good governance*, transparan dan akuntabilitas. Sehingga pengeluaran pembangunan yang bersumber dari komponen APBD dapat mendorong laju perekonomian daerah maupun negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satina (2011), Muryawan dan Sukarsa (2016) dan Anisya (2019) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X_1) dan *Fiscal Stress* (X_2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dengan Kinerja Keuangan (Z) Sebagai Variabel Intervening

Hasil yang didapat dari penelitian intervening dan di dukung dengan berbagai uji di atas dapat dijelaskan bahwa Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi $0,490 > 0,05$, sehingga Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan *Fiscal Stress* pada Pertumbuhan Ekonomi $0,485 > 0,05$, sehingga Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan hasil yang diperoleh dinyatakan bahwa adanya desentralisasi fiskal belum mampu mengoptimalkan dana yang tersedia untuk kepentingan publik/masyarakat atau dana yang tersedia di APBD masih banyak terserap untuk belanja tidak langsung/pegawai sehingga ada program-program pembangunan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Sedangkan Pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah dan Undang-Undang yang membatasi penarikan pajak bagi pendapatan daerah mengakibatkan pemerintah di kabupaten/kota provinsi Bali rata-rata mengalami tekanan keuangan. Hal tersebut ditunjukan dengan tingginya rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target PAD. Dengan indikasi upaya pajak atau dengan kata lain terjadi peningkatan *fiscal stress*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satina (2011) dan Muryawan dan Sukarsa (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh tidak langsung Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening.

Simpulan Dan Saran**Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, dan *fiscal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020. Variabel *fiscal stress* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020.
2. Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020. Variabel *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020
3. Variabel kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali tahun 2014-2020.
4. Variabel Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh sehingga Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan *Fiscal Stress* pada Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh sehingga Kinerja Keuangan tidak dapat memediasi *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterbatasan

Pada penelitian ini terbatas pada empat variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek lain atau Provinsi lain yang jumlah Kota/ Kabupaten nya lebih banyak.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah Kota/ Kabupaten disarankan untuk lebih memperhatikan bagian *fiscal stress* dan kinerja keuangan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Anggeraini Oktarida, 2012. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jurnal Volume IV No.2.
- Arnett, Sarah B, 2011. *Fiscal Stress in the US. States: An Analysis of Measures and Responses*. George State University.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province). 2021. <https://bali.bps.go.id/indicator/52/111/3/pertumbuhan-pdrb-ekonomi-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- Bappenas, 2003. Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas TA-SRPP, Jakarta.
- Basri, F dan Munandar, H. 2010. “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Bohte, John dan Kenneth J Meier. 2000. *The Marble Cake : Introducing Federalism to The Government Growth Equation*. Publius. Summer. Hal : 35 – 99.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Kinara, Jaya, Wihana. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 15, Nomor 1, April 2014, hlm.12-22
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Muryawan, S. M., & Made Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2 (2016) : 229-252
- Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?. Jurnal Kritis (2005). Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Priyono, D. 2015. Cara kilat belajar analisis data dengan SPSS 2.0. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2016. Panduan Lengkap SPSS Versi 23. Jakarta : Elekmedia Computindo.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Shamsub, Hannarong, Joseph B. Akoto, 2004, “State and Local Fiscal Structure and Fiscal Stres”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 16, No.1
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah. Orasi Ilmiah. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanti, Meliya. 2019. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Infrastruktur panjang jalan, Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2017 (Studi Kasus 7 Provinsi di Indonesia). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Swasono, Fauziah. 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia. Economics and Finance in Indonesia, Vol. 55(2).
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Zainatun Fajria*) Adalah Mahasiswa FEB Unisma

Budi Wahono**) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Eka Farida***) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma